

ANALISIS WACANA KRITIS VAN DIJK PADA OPINI JAWA POS EDISI 24 NOVEMBER 2021

Yuwananing Citra Kurnia Palupi

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
yuwananing.18120@mhs.unesa.ac.id

Fafi Inayatillah

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
fafinayatillah@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis opini berjudul “Menagih Janji Mendikbud Mengangkat 1 Juta Guru” dengan teori analisis wacana kritis Teun A. van Dijk. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini yaitu surat kabar Jawa Pos Edisi 24 November 2021 pada kolom opini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak dan catat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif, dengan melalui 3 tahapan yaitu mereduksi data, mengolah data dengan menganalisisnya, dan terakhir menyimpulkan. Hasil penelitian ini yaitu kritik konstruktif terhadap janji PPPK yang gagal terpenuhi karena kesalahan pemerintah. Dengan demikian pemerintah diharapkan melakukan perbaikan implementasi kebijakan. Argumentasi penulis meyakinkan publik karena penulis berideologi guru. Tulisan ini menjadi media yang tepat karena penulis memiliki akses dan pengaruh di media. Opini ini berperan sebagai sarana menyuarakan nasib guru-guru yang menunggu kontrak. Harapannya pemerintah membaca opini sehingga proses pelaksanaan kebijakan selanjutnya dapat berjalan secara maksimal.

Kata Kunci: analisis wacana kritis, opini pendidikan, guru honorer, janji Mendikbud, Hari Guru Nasional

Abstract

This study aims to analyze the opinion entitled "Collecting the Promise of the Minister of Education and Culture to Appoint 1 Million Teachers" with the theory of critical discourse analysis of Teun A. van Dijk. This study used descriptive qualitative method. The data source for this research is the Jawa Pos newspaper, November 24, 2021 edition, in the opinion column. Data collection was carried out by observing and recording techniques. The data analysis technique used is descriptive analysis technique, by going through 3 stages, namely reducing data, processing data by analyzing it, and finally concluding. The results of this study are PPPK promises that failed to be fulfilled due to government errors. Thus the government is expected to make improvements to policy implementation. The author's argument convinces the public because the author has the ideology of a teacher. This article is the right medium because the author has access and influence in the media. This opinion serves as a means of voicing the fate of teachers who are waiting for contracts. It is hoped that the government will read the opinion so that the next policy implementation process can run optimally.

Keywords: critical discourse analysis, educational opinion, honorary teachers, Minister of Education and Culture promise, National Teacher's Day

PENDAHULUAN

Dalam surat kabar terdapat berbagai wacana dengan topik yang menarik. Wacana adalah penggunaan bahasa dalam suatu komunikasi baik secara lisan maupun tulisan (Cook, 1989: 6-7). Wacana merupakan susunan kalimat yang saling berangkaian baik itu secara lisan maupun dalam sebuah tulisan dengan menggunakan bahasa yang sempurna sesuai kaidahnya. Dalam suatu wacana, terdapat maksud yang akan disampaikan kepada pembaca. Seperti halnya pada wacana dalam surat kabar, baik wacana berita maupun wacana opini, keduanya ditulis dengan maksud untuk menyampaikan pesan kepada para pembaca.

Wacana opini pada surat kabar merupakan kumpulan gagasan atau pendapat dari seseorang dari suatu hal yang diuraikan dalam sebuah wacana. Dalam wacana opini diselipkan beberapa fakta untuk mendukung pemikiran penulis. Kolom opini menjadi wadah untuk penulis yang ingin memberikan argumennya kepada publik. Topik yang diangkat dalam opini biasanya sesuatu yang menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat saat itu atau momen yang berkaitan dengan hari dan tanggal diterbitkannya surat kabar tersebut.

Tanggal 25 November ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional di Indonesia. Tidak hanya siswa dan guru yang memperingati hari nasional tersebut, tetapi surat kabar juga ikut merayakannya dengan mengangkat tema yang

berkaitan dengan guru dalam tulisannya, baik itu dalam bentuk berita atau opini yang tersaji.

Dalam peringatan Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November 2021, berbagai surat kabar menerbitkan tulisan baik berita maupun opini yang berkaitan dengan guru. Seperti surat kabar Jawa Pos edisi 24 November 2021. Media tersebut menerbitkan tulisan dengan mengangkat topik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai kebijakan baru untuk pengangkatan guru, judul dari opini tersebut “*Menagih Janji Mendikbud Mengangkat 1 Juta Guru*” karya Satriwan Salim. Salim mengangkat masalah penderitaan guru honorer yang sampai saat ini tidak diberi kepastian dan kebijakan.

Opini tersebut menarik diteliti dengan kajian analisis wacana kritis. Kemampuan memahami wacana dapat memudahkan seseorang dalam memahami bahasa secara luas, tidak hanya berdasarkan struktur formal bahasa (Diah, 2020:1). Bahasa dianggap sebagai alat untuk mengungkapkan maksud tersembunyi atau ideologi pengguna bahasa. Menurut Diah Analisis Wacana Kritis (AWK) pembahasannya didominasi sosial dan politik baik secara eksplisit maupun implisit yang berupa perubahan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, pemaksaan ideologi, dan ketidakadilan sosial dengan menganalisis bahasa (Diah, 2020:45).

Ideologi berkaitan erat dengan bahasa. Pemilihan bahasa yang sesuai dapat mempengaruhi, mengubah, atau bahkan menguasai pemahaman dan pemikiran pembaca terhadap suatu gagasan yang dituangkan penulis dalam teks tersebut sehingga pembaca dapat menerima dan meyakini ideologi penulis.

Wacana opini karya Satriwan Salim secara umum membahas tentang ketidakadilan sosial yang diterima oleh guru sebagai pendidik anak bangsa. Oleh karena itu, melalui wacana yang ditulis oleh Satriwan Salim dapat dianalisis menggunakan kajian analisis wacana kritis van Dijk agar lebih memahami ideologi yang akan disampaikan melalui bahasa yang ditulis.

Analisis wacana kritis menggunakan teori van Dijk memfokuskan pada tiga hal, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pada bagian teks dilakukan analisis dari segi struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro.

Struktur makro menjelaskan keseluruhan isi teks. Berisi gagasan inti atau ringkasan yang dibahas dalam teks tersebut. Dalam struktur makro menunjukkan tema yang digunakan dalam suatu wacana.

Superstruktur atau struktur skematik merupakan rangkaian dari teks. terdapat dua pembahasan dalam superstruktur yaitu *summary* dan *story*. *Summary* berisi judul dan membahas rangkaian teks yang terdiri dari 5W+1H. Sedangkan *story* berisi rangkaian teks secara keseluruhan. Alur dari awal teks hingga akhir teks.

Struktur mikro berkaitan dengan semantik, sintaksis, dan stilistika. Semantik adalah kajian ilmu linguistik yang membahas makna. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam sebuah kalimat, paragraf, maupun dalam sebuah teks, dilakukan analisis latar, detail, maksud, dan pengandaian. Latar merupakan bagian yang digunakan untuk menganalisis maksud yang akan disampaikan penulis kepada pembaca. Detail merupakan rincian dari keseluruhan wacana dengan menuliskan poin terpenting, atau alur dari wacana tersebut. Maksud adalah makna disampaikan kepada pembaca dengan cara memberikan informasi untuk mendukung agar mendapatkan simpati pembaca. Pengandaian digunakan untuk mendukung gagasan penulis dengan menggunakan kalimat pengandaian.

Sintaksis adalah kajian ilmu linguistik yang membahas aturan dalam pembentukan kalimat. Untuk mengetahui penggunaan kalimat dalam wacana opini dilakukan analisis sintaksis dengan membahas bentuk kalimat yang terdiri atas penggunaan kalimat aktif dan pasif. Kemudian menganalisis kata ganti, dalam sebuah wacana surat kabar tidak banyak menggunakan kata ganti. Selain bentuk kata dan kata ganti, dalam semantik koherensi juga dianalisis. Koherensi adalah hubungan antara kalimat dengan kalimat, dalam koherensi membahas konjungsi yang digunakan dalam wacana tersebut.

Stilistika merupakan pemilihan kata yang digunakan penulis untuk mendukung tulisannya. Stilistika digunakan untuk menarik minat pembaca. Penggunaan stilistika ditandai dengan penggunaan kata atau frasa yang asing atau jarang digunakan.

Selain menganalisis dari segi teks, van Dijk juga memperhatikan kognisi dan konteks sosial. Kognisi sosial dalam sebuah wacana merupakan proses wacana tersebut diproduksi. Kognisi sosial melihat dari sisi latar belakang penulis, apakah alasan penulis tersebut menuangkan gagasannya ke dalam wacana opini. Terkait konteks sosial, teks dianalisis berdasarkan wacana yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks sosial, dibahas keberterimaan masyarakat umum terhadap wacana yang ditulis.

Penelitian yang berhubungan dengan artikel ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Arsyandikayani dan Sumarlan dengan judul “*Wacana Opini People Power, Akhirnya Akan Mencari Legitimasi Konstitusional (Pendekatan Analisis Wacana Kritis Van Dijk)*”. Penelitian tersebut memiliki persamaan menggunakan teori analisis wacana kritis van Dijk. Terdapat beberapa perbedaan di antaranya, terletak pada pembahasan penelitian yang dilakukan Arsyandikayani dan Sumarlan yaitu struktur mikro dan konteks sosial, sedangkan dalam penelitian ini dilengkapi dengan pembahasa kognisi sosial. Perbedaan lainnya yaitu pada objek penelitian,

Arsyandikayani dan Sumarlan menggunakan objek penelitian teks opini yang dimuat dalam media *online* detikNews.com pada tanggal 16 Mei 2019, sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian teks opini surat kabar Jawa Pos edisi 24 November 2021. Perbedaan selengkapnya dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian

No	Tahun	Fokus	Objek	Topik
1	2015	Struktur teks, kognisi sosial, konteks sosial	Teks editorial berjudul "Bukan Generasi Mbah"	Politik
2	2018	Struktur mikro dan makro	Teks berita berjudul "Curhat di Twitter"	Sosial
3	2019	Struktur teks dan konteks sosial teks opini	Teks opini berjudul "Power People" Akhirnya Akan Mencari Legitimasi Konstitusional"	Politik
4	2021	Struktur teks, kognisi sosial, konteks sosial	Teks opini "Menagih Janji Mendikbud Mengangkat 1 Juta Guru"	Pendidikan

METODE

Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan oleh penulis terdapat dua macam, yaitu teknik simak dan catat. Menurut Mahsun (2019:91) istilah menyimak tidak hanya digunakan untuk data yang berupa lisan saja tetapi dapat digunakan untuk pengambilan data yang berupa tulisan. Oleh karena itu, penulis menggunakan teknik simak untuk pengambilan data pada opini Jawa Pos. Teknik simak dilakukan dengan menyimak tulisan yang menyangkut penggunaan bahasa serta data-data yang diperlukan dalam analisis wacana. Setelah data penelitian didapat melalui teknik simak dilanjutkan dengan teknik catat yaitu dengan mencatat poin penting yang ada dalam tulisan tersebut secara garis besar yang kemudian penulis mengolah data tersebut menjadi kalimat pernyataan yang baru. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini Jawa Pos edisi 24 November 2021 dengan judul "Menagih Janji Mendikbud Mengangkat 1 Juta Guru" oleh Satriawan Salim. Teknik analisis data yang

digunakan yaitu teknik analisis deskriptif, dengan melalui 3 tahapan yaitu mereduksi data, mengolah data dengan menganalisisnya, dan terakhir menyimpulkan.

Penelitian yang berupa analisis pada artikel ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Teun A. van Dijk. Menurut van Dijk (2020:16) wacana dibagi menjadi tiga dimensi yaitu, teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Fokus penelitian dari penelitian ini adalah meneliti dan menganalisis struktur teks (bahasa) dari opini Jawa Pos dengan memperhatikan detail seperti tema teks, rangkaian teks berupa alur, semantik, sintaksis, dan stilistika, lalu meneliti dan menganalisis dimensi selanjutnya yaitu kognisi sosial yang berkaitan dengan proses produksi wacana, dan yang terakhir konteks sosial yaitu mengkritisi wacana sesuai dengan kondisi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis wacana kritis menggunakan teori van Dijk pada opini surat kabar Jawa Pos edisi 24 November 2021 diperoleh data yang berupa struktur teks wacana opini, kognisi sosial, serta konteks sosial. Berikut sajian datanya.

Struktur Teks

1. Struktur Makro

Pengamatan terhadap struktur makro bertujuan untuk menemukan tema atau topik yang merupakan inti dari bahasan wacana. Gagasan penulis yang ingin disampaikan melalui tulisannya dapat diamati dengan stuktur makro. Tema yang terdapat dalam wacana opini Jawa Pos edisi 24 November 2021 adalah kritik konstruktif terhadap kebijakan baru pemerintah terhadap guru yaitu PPPK. Tema tersebut menggambarkan penulis mengkritik kebijakan baru PPPK yang masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Selain kendala yang terjadi, penulis juga menjelaskan ketidakadilan yang diterima guru honorer dan guru swasta. Penulis mencoba untuk bersikap bijak untuk tidak memihak salah satu pihak, penulis juga berharap tulisannya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan PPPK pada tahap selanjutnya.

2. Superstruktur

(1) Summary

No	Data	Summary
1	Apa yang dibahas pada opini Jawa Pos edisi 24 November 2021? Tidak terpenuhinya janji Mendikbudristek untuk mengangkat 1 juta guru di Indonesia yang menyebabkan ketidakadilan guru honorer terus berlanjut Apa kebijakan baru Kemendikbud yang dibahas dalam wacana opini tersebut?	Apa (<i>what</i>)

	Pengubahan status guru yang dulunya guru masuk pada golongan PNS (Pegawai Negeri Sipil) menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).				persoalan tersebut terjadi akibat buruknya komunikasi dan koordinasi Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah. Keempat secara teknis dalam seleksi guru PPPK tahap 1, banyak kekurangan dan ketidakadilan.		
2	<p>Siapa yang dibahas dalam opini tersebut? Guru honorer yang masih berharap akan keadilan atas kerja kerasnya mengajar dan mendidik anak bangsa.</p> <p>Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan baru PPPK? Kemendikbud, pemerintah daerah, dan guru honorer. Kemendikbud diharapkan dapat lebih maksimal dalam melaksanakan kebijakan baru ini, terutama dalam menyosialisasikan terkait kebijakan baru kepada pemerintah daerah, yang mana pemerintah daerah di sini berperan dalam memfasilitasi pengajuan guru honorer</p>	Siapa (<i>who</i>)			4	<p>Kapan kebijakan perubahan guru menjadi PPPK diberlakukan? Kebijakan perubahan guru yang sebelumnya Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberlakukan mulai tahun 2019 yang sudah meloloskan 34.954 guru PPPK pertama kali, kemungkinan kebijakan tersebut akan terus berlaku sampai tahun 2024 atau bahkan lebih.</p>	Kapan (<i>when</i>)
3	<p>Mengapa kebijakan baru tersebut dirasa masih kurang maksimal dalam penerapannya? Karena kurangnya sosialisasi terkait kebijakan baru perubahan status guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Kemendikbud kepada pemerintah daerah, yang mana kebijakan baru tersebut masih dirasa asing, sedangkan pemerintah daerah sendiri memiliki peran penting dalam memfasilitasi guru honorer untuk pengangkatan PPPK.</p> <p>Mengapa Kemendikbud dirasa tidak dapat memenuhi janjinya mengangkat 1 juta guru? Karena terdapat empat alasan yaitu, pertama minimnya formasi yang diajukan daerah tidak sesuai dengan kuota Mendikbud yang berjumlah 1.002.616 formasi. Kedua pemda masih meragukan sumber anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK. Ketiga</p>	Mengapa (<i>why</i>)			5	<p>Daerah mana saja yang sudah berpartisipasi mengajukan formasi pengangkatan guru menjadi PPPK? Daerah yang sudah mengajukan formasi yaitu, Kabupaten Garut mengusulkan 196 formasi, Kabupaten Karawang mengusulkan 1.080 formasi, Kota Surabaya 54 guru, Kabupaten Serang hanya 1 guru. Pada tahap kedua sembilan pemda tidak lagi membuka seleksi guru PPPK diantaranya, Surabaya, Kuningan, Cilacap, Rembang, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Nias Utara, Bandung, dan Tasikmalaya. Bahkan Provinsi Sumatera Utara dan belasan kota/kabupaten lain tidak mengajukan formasi guru PPPK 2021.</p>	Di mana (<i>where</i>)
					6	<p>Bagaimana solusi untuk menghadapi masalah tersebut? Salah satu solusi untuk membenahi kebijakan tersebut yaitu Mendikbudristek dapat meyakinkan pemerintah daerah dengan memperbaiki komunikasi dan koordinasi untuk menambah jumlah formasi guru PPPK di semua daerah di Indonesia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan setiap daerah agar dapat mengakomodasi semua</p>	Bagaimana (<i>how</i>)

	guru honorer.	
--	---------------	--

(2) *Story*

Story yang terdapat pada opini tersebut yaitu penulis menjelaskan ketidakadilan yang diterima guru honorer dan guru swasta, kemudian pada paragraf 3 penulis mulai memperkenalkan permasalahan yang akan dibahas dalam wacana tersebut yaitu, darurat kekurangan guru. paragraf selanjutnya menjelaskan solusi sementara permasalahan kekurangan guru yaitu perekrutan PPPK. Pada tahun 2021 dibuka perekrutan guru secara besar-besaran oleh Kemendikbudristek dengan janji perekrutan sebanyak 1 juta guru. Namun, dalam pelaksanaan janji tersebut, PPPK mengalami banyak kendala yang membuat janji tersebut tidak dapat terpenuhi. Paragraf selanjutnya menjelaskan alasan tersebut, terdapat empat alasan gagalannya janji tersebut, dan dijelaskan secara rinci oleh penulis.

3. Struktur Mikro

Struktur mikro merupakan struktur yang membahas makna wacana opini "*Menagih Janji Mendikbud Mengangkat 1 Juta Guru*" berdasarkan bagian kecil suatu teks yaitu aspek kebahasaan dan ilustrasi.

(1) Semantik

Pada struktur mikro bagian semantik terdapat empat hal yang perlu dibahas yaitu, latar, detail, maksud, dan pengandaian.

a. Latar

Latar dalam wacana ini dapat dilihat dari paragraf pertama kalimat satu sampai dengan tiga dalam wacana tersebut. Berikut datanya.

"Animo guru honorer dan guru swasta menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sangat tinggi. Pilihan rasional demi memperbaiki nasib. Mengingat realita upah guru honorer dan swasta rata-rata di bawah standar kelayakan, jauh di bawah upah minimum buruh." (paragraf 1)

Dari kalimat pertama terdapat kata PPPK merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah untuk guru. Kalimat pertama terdapat kata animo pada awal kalimat dan kata sangat tinggi pada akhir kalimat, kedua kata tersebut menunjukkan bahwa adanya kebijakan baru tersebut meningkatkan antusiasme guru honorer dan guru swasta untuk ikut serta dalam perekrutan PPPK.

Pemilihan kata rasional mendukung kalimat pertama, yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan baru yaitu

pengubahan status guru yang dulu termasuk ke dalam golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memberikan peluang baru kepada guru agar profesinya menjadi lebih terjamin sehingga membuat para guru honorer dan guru swasta lebih bersemangat memperjuangkan statusnya. PPPK menjadi harapan guru honorer dan swasta untuk memperbaiki nasib agar lebih baik lagi.

Pada kalimat ketiga, kesejahteraan guru dipertanyakan, guru honorer dan guru swasta memiliki gaji yang sangat rendah bahkan di bawah rata-rata upah minimum buruh. Realitanya tidak sedikit guru yang mengeluhkan gaji yang sangat rendah tidak sebanding dengan pekerjaannya, padahal guru honorer dan guru swasta memiliki peran sama besarnya dalam pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan kalimat-kalimat di atas dapat disimpulkan bahwa penulis ingin menyampaikan ketidakadilan yang diterima guru honorer dan swasta, mereka yang sudah berjuang untuk membantu mencerdaskan anak bangsa, tetapi sangat kurang dipresiasi oleh negara, serta pemerintah yang terkesan kurang cekatan dan kurang maksimal dalam mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi masalah tersebut. Pembaca diajak untuk berempati kepada para guru honorer dan swasta yang masih menggantung nasibnya.

Kebijakan baru tersebut juga menimbulkan masalah-masalah baru. Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek menjajikan untuk pengangkatan 1 juta guru, oleh karena itu opini tersebut dimaksudkan menagih janji Mendikbudristek untuk mengangkat 1 juta guru dari peserta perekrutan PPPK. Namun, janji tersebut ternyata gagal terpenuhi karena beberapa alasan yang sudah disebutkan dalam wacana opini tersebut.

Dapat disimpulkan latar dalam wacana opini yaitu guru non PNS merasa kurang sejahtera karena minimnya apresiasi dari pemerintah, mereka bersemangat untuk mengikuti PPPK demi mengubah nasib. Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek memberikan janji yaitu mengangkat 1 juta

guru dalam perekrutan PPPK, namun janji tersebut gagal terpenuhi

b. Detail

Detail yang dipaparkan dalam wacana opini surat kabar Jawa Pos sebagai berikut:

- (1) Menagih Janji Mendikbud Mengangkat 1 Juta Guru (judul)
- (2) Keluarnya kebijakan baru yaitu mengubah status guru yang dulunya Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi PPPK (paragraf 1)
- (3) Di Indonesia saat ini terjadi darurat kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN), padahal sekolah membutuhkan guru ASN, untuk menutup masalah tersebut maka sekolah merekrut guru honorer (paragraf 3)
- (4) Jika terus berlanjut akan menimbulkan masalah baru lagi, oleh karena itu perekrutan PPPK ini menjadi jalan keluar sementara untuk permasalahan akibat kekurangan guru ASN (paragraf 5)
- (5) Namun, janji Mendikbud ristek Nadiem Makarim untuk mengangkat 1 juta guru PPPK dirasa tidak sanggup dipenuhi karena empat alasan (paragraf 6)
- (6) Empat alasan tersebut yaitu: minimnya formasi guru yang diajukan pemda, pemda masih meragukan sumber anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK, persoalan-persoalan tersebut muncul akibat kurangnya koordinasi Kemendikbudristek dengan Pemda, dan alasan yang terakhir secara teknis masih banyak kekurangan dan ketidakadilan yang terjadi pada pelaksanaan perekrutan PPPK tahap I (paragraf 7-12)
- (7) Karena masih tersisa dua tes lagi diharapkan Mendikbudristek dapat meyakinkan Pemda untuk menambah formasi guru yang diajukan dan bersikap adil dalam seleksi guru PPPK. (paragraf 13)

c. Maksud

Maksud yang ingin disampaikan penulis dan redaksi melalui teks opini Jawa Pos yang berjudul "*Menagih Janji Mendikbud Mengangkat 1 Juta Guru*" adalah mengkritisi kebijakan baru yang dikeluarkan Kemendikbudristek yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Masih terdapat

beberapa kendala, bahkan permasalahan yang muncul berasal dari pemerintah itu sendiri. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa alasan di antaranya, keputusan pemda yang mengajukan sedikit formasi berbanding terbalik dengan jumlah guru honorer di daerahnya, serta pemda yang masih ragu sumber tunjangan PPPK padahal sudah jelas. Selain itu, kurangnya koordinasi antara Kemendikbudristek dengan pemda merupakan salah satu faktor utama dalam gagalnya janji mengangkat 1 juta guru tersebut.

d. Pengandaian

Bagian pengandaian dapat ditemukan pada kalimat. Berikut datanya.

"Alasan kekurangan guru, sekolah (daerah) bakal seterusnya merekrut guru honorer yang melahirkan masalah baru" (paragraf 4).

Pada kalimat tersebut secara tersirat menyampaikan bahwa, seandainya pemerintah dapat dengan cepat mengatasi permasalahan pengangkatan guru, tidak akan ada status darurat kekurangan guru di Indonesia. Yang dimaksud dengan kekurangan guru adalah kurangnya guru ASN, yaitu guru berstatus PNS yang masih mengajar di sekolah. Oleh karena itu, mau atau tidak sekolah tetap merekrut guru honorer untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik di sekolah agar pembelajaran tetap berjalan dengan semestinya.

Selain pada paragraf ke-4, bagian pengandaian terdapat pada kalimat. Berikut datanya.

"Lagi-lagi, guru honorer menjadi korban buruknya pengelolaan rekrutmen guru oleh pemerintah" (paragraf 11).

Secara tersirat kalimat tersebut menyampaikan, seandainya pemerintah dapat dengan maksimal dalam melakukan rekrutmen guru honorer menjadi guru ASN, akan meminimalkan penderitaan yang dirasakan oleh guru honorer. Impian untuk memperbaiki nasib akan dapat terwujud. Pengelolaan rekrutmen guru oleh pemerintah masih memiliki banyak kekurangan. Ketika pengangkatan guru

masih menggunakan kebijakan lama yaitu guru diangkat menjadi PNS, kuota untuk meloloskan guru PNS sangat sedikit setiap tahunnya. Selanjutnya, pada kebijakan yang baru pengangkatan guru menjadi PPPK, Kemendikbudristek memberikan kesempatan yang besar kepada guru seluruh Indonesia yaitu dengan memberikan kuota yang banyak pada rekrutmen tahun pertama, namun kuota tersebut malah tidak terpenuhi karena munculnya permasalahan internal yaitu dari pemerintah. Kemendikbudristek kurang berkomunikasi dengan pemerintah daerah sehingga menyebabkan gagalnya koordinasi dengan pemerintah daerah yang berperan sangat penting dalam pengajuan formasi guru honorer pada rekrutmen PPPK. Seandainya Kemendikbudristek dapat berkoordinasi baik dengan pemerintah daerah, kuota 1 juta pengangkatan guru PPPK di seluruh Indonesia akan terpenuhi, termasuk dengan janji Mendikbud juga dapat terlaksana. Bahkan permasalahan kekurangan guru di Indonesia dapat terpecahkan.

Pengandaian dalam wacana opini digunakan untuk mendukung argumen penulis. Makna dalam pengandaian disampaikan secara tersirat.

(2) Sintaksis

Pada struktur sintaksis terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Bentuk kalimat

(1) Aktif

Bentuk kalimat aktif yaitu kalimat yang di dalamnya menggunakan kata kerja bentuk aktif. Subjek dalam kalimat tersebut aktif melakukan sesuatu. Kata kerja bentuk aktif yaitu ditandai dengan penggunaan imbuhan *me-*. Salah satu kata aktif yaitu memenuhi. Berikut datanya.

“...*gagalnya*
Kemendikbudristek **memenuhi**
janjinya.” (Paragraf 7)

Kata memenuhi berasal dari kata dasar penuh kemudian mendapatkan imbuhan *me-* menjadi memenuhi. Kata kerja bentuk aktif digunakan sebanyak 26 kali. Kata kerja aktif digunakan pada

saat subjek dalam kalimat tersebut adalah Kemendikbudristek.

(2) Pasif

Bentuk kalimat pasif yaitu kalimat di dalamnya terdapat kata kerja bentuk pasif. Pada kalimat pasif subjeknya dikenai sesuatu. Kata kerja pasif ditandai dengan penggunaan imbuhan *di-*. Salah satu kalimat pasif terdapat pada paragraf 3. Berikut datanya.

“... *guru Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat besar dan mendesak* **dipenuhi.**” (Paragraf 3)

Terdapat kata dipenuhi, kata dasar dipenuhi adalah penuh kemudian mendapatkan imbuhan *di-* menjadi dipenuhi. Subjek yang dikenai kata kerja bentuk pasif adalah guru. Pada kalimat tersebut menjelaskan bahwa kekurangan guru ASN sangat mendesak untuk segera dipenuhi agar angka kekurangan guru tidak lagi bertambah dan pendidikan di Indonesia menjadi lebih stabil. Kata kerja pasif dalam wacana opini tersebut digunakan sebanyak 16 kali.

Dapat disimpulkan kalimat aktif lebih dominan digunakan daripada kalimat pasif. Kalimat aktif digunakan sebanyak 26 kali sedangkan kalimat pasif digunakan sebanyak 16 kali. Alasan penggunaan kalimat aktif lebih banyak karena subjek yang banyak dibahas adalah Kemendikbudristek.

b. Kata ganti

Satriawan Salim menggunakan kata ganti yang berbeda-beda. Kata ganti ini disesuaikan dengan konteksnya.

(1) Kita

Kata ganti kita digunakan dalam opini sebanyak satu kali. Berikut datanya.

“*Jadi, **kita** mengalami darurat nasional kekurangan guru ASN.*” (Paragraf 3)

Pemilihan kata ganti kita dalam teks opini tersebut memiliki arti penulis yang mewakili perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G). Kita dalam kalimat tersebut digunakan

sebagai kata ganti orang pertama jamak. Kita juga dimaksudkan untuk pihak yang bergabung dalam P2G.

(2) Mereka (paragraf 13)

Kata ganti mereka digunakan sebanyak dua kali pada paragraf 11 dan paragraf 13 yang mengacu pada guru honorer. Berikut datanya.

“... **mereka** memperbaiki peruntungan....” (Paragraf 11)

Mereka pada paragraf 13 merupakan kata ganti orang ketiga jamak. Mereka yang dimaksud dalam teks opini adalah peserta PPPK, baik itu guru honorer sekolah negeri dan swasta, honorer THK-II, atau lulusan PPG.

(3) *-nya* (paragraf 5)

Pada paragraf 5 terdapat kata ganti *-nya* yang merupakan kata ganti pemilik. Kata ganti pemilik berguna untuk menyatakan suatu kepemilikan. Kata ganti *-nya* dalam kalimat tersebut menunjukkan kepemilikan dari guru PNS. Berikut datanya.

“Kontras dengan guru PNS yang durasi pengabdian**nya** relatif lama sampai 60 tahun pensiun.” (Paragraf 5)

Kata pengabdian**nya** merujuk pada kepemilikan guru PNS, hal tersebut dapat dilihat pada kata sebelumnya. Dalam kalimat tersebut menjelaskan bahwa sangat berbeda anatar guru PPPK dengan guru PNS, guru PPPK kontrak kerja paling cepat satu tahun dan paling lama 5 tahun. Berbanding terbalik dengan pengabdian guru PNS dengan kontrak kerja sampai usia 60 tahun pensiun.

(4) *-nya* (paragraf 7)

Pada paragraf 7 meskipun memiliki kata ganti yang sama dengan paragraf 5, namun keduanya memiliki konteks yang berbeda. Pada paragraf 7 kata ganti *-nya* memiliki arti Kemendikbudristek. Berikut datanya.

“... **Kemendikbudristek** memenuhi janjinya.” (Paragraf 7)

Dalam kalimat tersebut terdapat kata Kemendikbudristek sebelum kata janjinya. Dalam kalimat tersebut dijelaskan bahwa, Kemendikbudristek memiliki janji, namun janji Kemendikbudristek tersebut gagal terpenuhi, dan kegagalan tersebut terdapat 4 penyebab.

c. Koherensi

Koherensi pada wacana opini “Menagih Janji Mendikbud Mengangkat 1 Juta Guru” terdiri dari 7 jenis konjungsi yang berbeda-beda, yaitu:

(1) Tapi, Namun

Konjungsi tapi dan namun termasuk ke dalam konjungsi adversatif. Konjungsi adversatif yaitu konjungsi yang digunakan untuk menyambungkan dua klausa dan kalimat yang menyatakan kontras. Berikut datanya.

“Padahal, skema PNS adalah solusi jangka panjang, **tapi** pemerintah tidak lagi membuka penerimaan guru PNS sejak 2020.” (Paragraf 5)

Pada klausa sebelum tapi merupakan klausa dengan maksud skema PNS untuk guru merupakan solusi yang baik untuk jangka waktu yang lama, kontrak guru PNS relatif lama dan hal tersebut dapat membantu guru untuk memperbaiki nasib. Tapi pada tahun 2020 skema PNS sudah ditiadakan dan diganti PPPK yang merupakan kebijakan baru untuk nasib guru.

Konjungsi adversatif kedua yaitu namun. Konjungsi namun memiliki makna yang sama dengan konjungsi tapi. Konjungsi namun digunakan untuk menghubungkan dua kalimat pada paragraf 6. Berikut

“Pertama dalam sejarah, tidak pernah ada rekrutmen ASN sefantastif ini sebelumnya. **Namun**, janji Mendikbudristek Nadiem Makarim mengangkat satu juta guru rasanya tidak sanggup terpenuhi.” (Paragraf 6)

Pada kalimat pertama menyatakan rekrutmen ASN tersebut

disebut luar biasa karena pemerintah dapat melakukan rekrutmen ASN dengan kuota 1 juta, hal tersebut tentu saja disambut antusias oleh beberapa pihak. Kemudian kalimat selanjutnya dihubungkan dengan konjungsi namun yang diikuti kalimat selanjutnya menunjukkan maksud yang berlawanan dengan kalimat sebelumnya yaitu, meskipun kuota yang diberikan pemerintah 1 juta namun rasanya kuota tersebut tidak dapat terpenuhi karena beberapa alasan.

(2) Bahkan

Bahkan merupakan salah satu konjungsi intratekstual. Konjungsi intratekstual adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat. Misalnya pada kalimat pertama merupakan sebuah kalimat pernyataan, kemudian menggunakan konjungsi bahkan untuk menghubungkan kedua kalimat tersebut, pada kalimat kedua merupakan kalimat pendukung kalimat pernyataan pertama. Berikut datanya.

*“Keputusan itu agaknya hingga 2024, **bahkan** bisa saja jangka panjang mengingat PPPK menjadi alternatif yang lebih meringankan anggaran negara.”* (Paragraf 5)

Pada kalimat pertama dinyatakan bahwa keputusan mengenai kebijakan PPPK untuk guru merupakan keputusan yang akan berlaku hingga 2024, kemudian dilanjutkan dengan konjungsi bahkan dan kalimat pendukung yaitu bisa saja kebijakan baru tersebut diterapkan dalam jangka waktu yang relatif lama karena dengan adanya kebijakan PPPK dapat meringankan anggaran negara.

(3) Akibatnya-karena

Konjungsi akibatnya-karena merupakan konjungsi yang digunakan untuk menyatakan sebab-akibat. Konjungsi tersebut disebut konjungsi klausal. Konjungsi klausal sering ditemui pada teks opini. Pada konjungsi klausal terdapat klausa atau kalimat yang menyatakan sebab dan satu klausa

atau kalimat yang menyatakan akibat. Pada paragraf 12 terdapat konjungsi klausal, pada kalimat pertama menyatakan akibat.

*“**Akibatnya**, guru yang hasil tes melampaui AB dinyatakan tak lulus **karena** berasal dari sekolah lain.”* (Paragraf 12)

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kata pertama pada kalimat tersebut adalah konjungsi akibatnya. Pada klausa kalimat berikutnya menyatakan sebab, hal tersebut dapat dibuktikan dengan konjungsi karena. Maksud dari kalimat tersebut yaitu skema penerimaan PPPK lebih mengutamakan guru yang berasal dari sekolah induk, akibatnya guru yang mengikuti rekrutmen PPPK yang bukan berasal dari sekolah induk tidak dinyatakan lulus meskipun mendapatkan nilai hasil tes melampaui AB.

(4) Dan

Konjungsi dan termasuk ke dalam konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang digunakan untuk menggabungkan dua klausa yang berstatus sama. Konjungsi dan sering digunakan dan dengan mudah menemukannya pada setiap teks, seperti pada teks opini yang ditulis Satriwan Salim. Ia banyak menggunakan konjungsi dan daripada konjungsi yang lain. Salah satu kalimat yang menggunakan konjungsi dan yaitu pada paragraf 11.

*“**Minimnya** daerah mengajukan formasi jelas mengecewakan guru honorer, akan memperkecil peluang menjadi PPPK, **dan** mematikan ikhtiar mereka memperbaiki peruntungan.”* (Paragraf 11)

Pada paragraf 11 terdapat tiga klausa yang ketiganya memiliki status yang sama, ketiga klausa tersebut sama-sama menunjukkan bahwa klausa tersebut merupakan akibat dari

koordinasi yang kurang baik yang menyebabkan daerah tidak mengajukan formasi guru PPPK.

(5) Baik-maupun

Konjungsi baik-maupun merupakan konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa yang sederajat. Maksud dari kata, frasa, atau klausa yang sederajat adalah kata, frasa, atau klausa yang tidak memiliki makna kontras satu sama lain, bukan sebagai kata pendukung, dan bukan frasa atau klausa yang memiliki makna sebab-akibat. Konjungsi baik-maupun termasuk ke dalam konjungsi korelatif. Pada paragraf 2 terdapat konjungsi baik-maupun yang digunakan untuk menghubungkan kata,

“... **baik** dari sekolah **maupun** dari negara selama ini.” (Paragraf 2)

Pada kalimat tersebut terdapat konjungsi baik pada awal kalimat, kemudian terdapat konjungsi maupun untuk menghubungkan kata sekolah dan negara.

Koherensi digunakan dalam wacana opini berfungsi untuk menguatkan data, mempertentangkan sesuatu dalam kalimat, serta untuk menghubungkan antar kalimat dengan kalimat. konjungsi yang berfungsi menguatkan data yaitu konjungsi baik-maupun dan bahkan. Konjungsi yang berfungsi untuk mempertentangkan kalimat yaitu konjungsi akibatnya-karena. Konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yaitu konjungsi tapi, namun, dan.

(3) Stilistika

Leksikon atau pilihan kata memiliki fungsi untuk memberi kesan makna dalam sebuah kalimat, dengan adanya leksikon pembaca akan dapat lebih merasakan simpati sehingga tujuan penulis dapat tercapai. Berikut beberapa data leksikon:

(1) Animo (Paragraf 1)

Animo memiliki arti hasrat atau keinginan yang kuat. Pada teks opini tersebut penulis menggunakan kata animo untuk memulai kalimatnya. Kata animo

berada di awal kalimat pada paragraf pertama dengan penulisan dicetak tebal, hal tersebut berguna untuk menarik minat pembaca. Ketika pembaca melihat teks opini tersebut dan membaca kalimat pertama, terlintas kata hasrat yang kuat. Kemudian pembaca akan mencari tahu dan merasa tertarik dengan isi teks opini tersebut.

(2) Ditopang (Paragraf 2)

Kata ditopang memiliki arti ditunjang atau disokong, atau dapat diartikan sebagai dibantu. Penulis menggunakan kata ditopang untuk menyampaikan bahwa pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan semestinya karena peran dari guru honorer. Seperti yang diketahui di Indonesia kekurangan guru ASN, guru honorer yang direkrut oleh sekolah memiliki peran penting untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik di sekolah tersebut agar pembelajaran terus berjalan dan sukses meskipun minimnya apresiasi dan proteksi yang didapat oleh guru honorer.

(3) Darurat (Paragraf 4)

Kata darurat memiliki arti dalam keadaan sulit. Suatu permasalahan yang berada di ujung tanduk, sangat mendesak untuk segera dicari jalan keluarnya. Kata darurat dipakai penulis untuk menyampaikan bahwa saat ini Indonesia memiliki masalah yang sangat mendesak yaitu kekurangan guru, dan permasalahan tersebut perlu segera diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah baru yang lain.

(4) Korban (Paragraf 11)

Memiliki arti orang yang menderita akibat suatu perbuatan yang jahat. Penulis ingin menyampaikan bahwa guru honorerlah yang mendapat dampak buruk dari kurang baiknya pengelolaan perekrutan guru oleh pemerintah. Dalam kebijakan yang baru guru honorer memiliki peluang yang lebih besar karena Kemendikbud memberikan kuota PPPK sebanyak 1 juta guru yang akan diangkat, hal tersebut disambut antusias oleh guru honorer di seluruh Indonesia, akan tetapi karena pengelolaan rekrutmen guru yang buruk serta kurangnya koordinasi Kemendikbud dengan pemerintah daerah menyebabkan kuota pengangkatan 1 juta guru gagal terpenuhi dan juga menghancurkan harapan guru honorer untuk lolos dalam pengangkatan tersebut. Kata

korban dipilih untuk memberikan kesan bahwa guru adalah pihak yang menderita dan terpuruk akibat kinerja pemerintah yang kurang baik.

Pemilihan kata dalam wacana opini digunakan untuk memberikan kesan estetik pada tulisan, dengan adanya kata-kata yang menarik akan berpengaruh terhadap daya tarik pembaca pada sebuah wacana.

Kognisi Sosial

Wacana yang ditulis Satriwan Salim tidak terlepas dari latar belakang pendidikan serta pekerjaannya. Satriwan Salim terlahir dari keluarga yang kurang mampu yang membuatnya ragu untuk meneruskan kuliah ketika ia tamat SMA, namun dengan prestasi yang cukup banyak ia berhasil mendapatkan beasiswa ketika SMA dan kuliah Strata 1. Satriwan Salim menempuh S1 di Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2009, dan menamatkan S2 di Jurusan Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia pada tahun 2009.

Satriwan Salim saat ini mengajar di *Lab School* Jakarta sebagai guru Pendidikan Kewarganegaraan. Ia juga menjadi staf pengajar di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, serta di UNJ ia juga menjadi staf pengajar di Universitas Terbuka (UT). Selain berprofesi sebagai guru, Satriwan Salim juga menjadi wakasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), pengurus Asosiasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI), serta menjadi koordinator nasional Perhimpunan untuk Pendidikan Guru (P2G).

Profesinya sebagai guru membuat Satriwan Salim ikut merasakan susahnyanya menjadi guru honorer dalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Dilihat dari latar belakangnya yang menjadi seorang guru membuat ia terinspirasi untuk menyuarakan keluh kesah penderitaan guru honorer yang ia tuangkan pada opini Jawa Pos.

Opini Jawa Pos edisi 24 November 2021 yang berjudul “*Menagih Janji Mendikbud Mengangkat 1 Juta Guru*” bukan tulisannya yang pertama kali. Sebelumnya ia sudah menulis berbagai macam opini tentang pendidikan di Indonesia dan sudah diterbitkan pada surat kabar Jawa Pos. Selain itu, Satriwan Salim juga pernah menulis opini yang menyinggung masalah guru honorer dan kebijakan PPPK, tulisan tersebut diantaranya, Kontrak Guru PPPK Diminta Minimal 5 Tahun (17 Januari 2021), Komitmen Pemerintah Menyejahterakan Guru Honorer Masih Dipertanyakan (15 Februari 2021), Guru Honorer Cuma Dapat Afirmasi 15 Persen, P2G: Tidak Adil (16 September 2021), P2G Soroti Seleksi Tahap 1 PPPK Guru (10 Oktober 2021), dan kemudian

disusul tulisannya yang berjudul “*Menagih Janji Mendikbud Mengangkat 1 Juta Guru*” (24 November 2021).

Konteks Sosial

“*Menagih Janji Mendikbud Mengangkat 1 Juta Guru*” merupakan salah satu dari banyaknya tulisan Satriwan Salim yang terbit dalam opini surat kabar Jawa Pos. Tulisan tersebut menyinggung kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah mengenai PPPK yang baru saja diterapkan untuk pengangkatan guru honorer, serta membahas pelaksanaan PPPK di lapangan yang nyatanya masih terdapat banyak kendala. Yang tertulis pada opini tersebut merupakan pendapat pribadi Satriwan Salim yang disampaikan untuk pembaca terlebih lagi bagi pemerintah dan guru-guru di Indonesia. Satriwan Salim menulis opini tersebut karena rasa tanggung jawabnya sebagai koordinator nasional P2G untuk memperjuangkan hak guru-guru di Indonesia.

Menagih Janji Mendikbud Mengangkat 1 Juta Guru diterbitkan pada surat kabar Jawa Pos dalam kolom opini pada tanggal 24 November 2021. Tulisan Satriwan Salim tentang kebijakan baru untuk guru diterbitkan tanggal tersebut guna memperingati bahwa besoknya tanggal 25 November ditetapkan setiap tahunnya untuk memperingati Hari Guru Nasional.

Kebijakan PPPK diterbitkan sejak tahun 2021 dan mulai dilaksanakan juga pada tahun tersebut. Kepanjangan dari PPPK yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat tertentu untuk diangkat menjadi ASN berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu yang telah disepakati. Yang dapat mendaftar PPPK diantaranya guru honorer sekolah negeri, honorer THK-II, guru honorer sekolah swasta, serta lulusan PPG. Kebijakan PPPK merupakan terobosan baru yang dikeluarkan pemerintah yang diharapkan dapat memperbaiki masalah pengangkatan guru. Karena kebijakan tersebut masih baru, tentu saja pelaksanaannya tidak langsung berhasil. Meskipun sudah direncanakan dengan baik dalam kenyataan di lapangan muncul permasalahan yang tidak terduga, di luar rencana. Satriwan Salim yang berprofesi menjadi guru ikut tergerak untuk menyuarakan pendapatnya mengenai kebijakan PPPK.

Menganalisis konteks sosial berhubungan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Konteks sosial merupakan wacana yang pada saat itu berkembang dalam masyarakat untuk mengetahui bagaimana wacana tersebut diproduksi dan dikonstruksi atau bagaimana peristiwa tersebut digambarkan dalam masyarakat. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan teori van Dijk yaitu dalam

analisis konteks sosial terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yaitu, kekuasaan dan akses. Hasil penelitian ini menemukan analisis dari kekuasaan dalam teks opini yang ditulis Satriwan Salim, serta pengaruh Satriwan Salim dalam mendapatkan akses media untuk publikasi karyanya.

Kekuasaan yang dimaksud dalam konteks sosial adalah kepemilikan seseorang atau kelompok dalam memberikan pengaruh kepada yang lain. dalam hal ini kekuasaan tersebut dimiliki oleh Kemendikbudristek, yang mana Kemendikbudristek memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan dan menerapkan kebijakan baru mengenai pengangkatan guru menjadi PPPK. Dengan harapan dapat merubah nasib guru di Indonesia dengan kebijakan baru yang dikeluarkan Kemendikbudristek.

Penulis dalam tulisannya mewakili suara para peserta PPPK. Meskipun ia bukan termasuk peserta PPPK, namun ia berusaha untuk memperjuangkan hak-hak guru di Indonesia. Ia dulu juga pernah mengalami masa-masa tersebut sebelum pengangkatan. Walaupun ia menuliskan gagasan dan pandangannya terhadap kebijakan PPPK, ia tidak memihak pada salah satu pihak. Ia mencoba bersikap netral dalam mengkritisi hal tersebut. Dalam tulisannya ia memberikan beberapa fakta di lapangan pelaksanaan PPPK dengan maksud pemerintah dapat membaca tulisannya dan dapat mengetahui apa saja kendala yang terjadi sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi dan dengan segera dicari jalan keluar permasalahannya. Terutama kendala yang berhubungan dengan koordinasi dengan pemerintah daerah yang ataupun pihak lainnya. Ia tidak rela jika kondisi tersebut tidak segera diatasi karena akan berdampak besar pada proses PPPK selanjutnya. Baik Kemendikbudristek, pemerintah daerah, sekolah, dan guru-guru formasi PPPK, memiliki peran penting dalam menyukseskan PPPK.

Satriwan Salim yang sudah lama berada dalam dunia pendidikan ini sering mengutarakan pendapatnya ke dalam sebuah tulisan. Ia sudah beberapa kali menerbitkan tulisannya yang berupa opini ke dalam surat kabar maupun dalam media *online*. Tulisan sebelumnya yang ia sampaikan juga tidak jauh dari topik pendidikan. Hal ini memberikan kepercayaan kepada media bahwa tulisan yang ia tulis layak untuk dibaca oleh masyarakat umum dan menarik minat pembaca. Dapat ditarik simpulan bahwa Satriwan Salim memiliki kesempatan akses media yang cukup besar untuk mempublikasikan karya-karyanya. Baik Kemendikbudristek maupun Satriwan Salim memiliki akses dan pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Kemendikbudristek yang dapat mengubah nasib guru-guru di Indonesia dan Satriwan Salim yang memperjuangkan hak-hak guru di Indonesia. Kedua pihak tersebut memiliki akses besar terhadap media dan pengaruh terhadap wacana dalam masyarakat.

Analisis wacana kritis dalam opini “*Menagih Janji Mendikbud Mengangkat 1 Juta Guru*” memperhatikan struktur teks mikro dengan memperhatikan semantik, sintaksis, dan stilistika, agar wacana opini menjadi teks wacana yang mudah dipahami oleh pembaca baik dari segi pemilihan kata, pemaknaan, atau bentuk kalimatnya. Pemilihan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami, maka maksud dari wacana tersebut akan tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Selain struktur teks, kognisi sosial juga berperan penting dalam penulisan wacana. Latar belakang penulis dapat mempengaruhi hasil tulisannya. Pada wacana tersebut mengangkat isu kebijakan PPPK untuk guru, hal tersebut sesuai dengan profesi Satriwan Salim sebagai guru untuk menyampaikan aspirasinya. Ia dapat menjelaskan secara rinci dan sesuai dengan realitas dalam masyarakat. Dalam wacana tersebut kebijakan baru pemerintah mendapatkan perhatian masyarakat terutama guru honorer, dibuktikan dengan antusiasme guru honorer yang menjadi peserta perekrutan PPPK.

Analisis wacana kritis pada opini tersebut menghasilkan data wacana yang memiliki struktur teks yang lengkap yang terdiri atas struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Hal tersebut membuat wacana memiliki seni yang padu agar maknanya dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Keterkaitan antara pemilihan kata dan bahasa menjadi faktor penting agar wacana dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, dengan begitu maksud penulis akan tersampaikan dengan baik. Latar belakang penulis yang memiliki profesi seorang guru membuatnya tersentuh untuk membantu rekan sesama guru yang belum mendapatkan haknya. Kemudian penulis menuangkan gagasannya kedalam opini dengan sudut pandang seorang guru. Penulis menulis opini tersebut berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil analisis berdasarkan konteks sosial, meskipun penulis menulis berdasarkan sudut pandang guru, namun penulis berusaha bersikap netral, tidak memihak pihak manapun. Penulis berharap dengan adanya tulisan tersebut pemerintah dapat mengetahui permasalahan yang saat ini dihadapi guru honorer dalam pelaksanaan PPPK, agar pada tahap selanjutnya dapat dilaksanakan secara adil dan lebih baik lagi. Ideologi penulis dapat tersampaikan kepada pembaca melalui pemilihan bahasa, ideologi dalam teks wacana tersebut yaitu membuat pembaca memberikan empati kepada guru honorer dan swasta dalam pelaksanaan PPPK yang masih terdapat banyak kendala dan ketidakadilan yang diterima oleh guru peserta perekrutan PPPK.

PENUTUP

Simpulan

Dari analisis struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial ditemukan bahwa teks opini ini bermakna kritis konstruktif terhadap PPPK. Gagasan tersebut dikemas dengan tata bahasa yang mendukung terkait argumen kebijakan Kemendikbudristek kurang maksimal dalam pelaksanaannya karena masalah yang berasal dari pemerintah. Dari analisis kognisi sosial, ditemukan bahwa opini ini diproduksi oleh penulis artikel produktif berlatar belakang guru yang dipengaruhi ideologi guru. Dari analisis konteks sosial, ditemukan bahwa penulis memiliki akses dan pengaruh ke media untuk menyampaikan aspirasinya.

Kritik konstruktif dalam wacana ini dipengaruhi ideologi guru yang meyakini evaluasi kebijakan PPPK dengan harapan adanya perbaikan kebijakan dari pemerintah. Penulis opini berharap agar masalah-masalah berkaitan dengan pengangkatan guru honorer dapat segera menemukan jalan keluarnya agar proses seleksi PPPK pada tahap selanjutnya dan pada tahun berikutnya dapat terlaksana secara maksimal.

Saran

Penelitian analisis wacana kritis diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Penelitian ini dapat berguna untuk mendukung pembelajaran bahasa Indonesia, terutama bagi pelajar dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber referensi untuk pembelajaran yang berkaitan dengan materi wacana, teks opini, dan materi analisis wacana. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai analisis wacana kritis, analisis teks opini, maupun penelitian yang mengambil topik PPPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, Tri. R. 2018. *Analisis Wacana Kritis Pada Koran Kompas Edisi 24 Mei 2012*. Jurnal Bindo Sastra, Vol. 2, Nomor 2, 253-261.
- Arsyandikani, Sumarlan. 2019. *Wacana Opini People Power, Akhirnya Akan Mencari Legitimasi Konstitusional (Pendekatan Analisis Wacana Kritis Van Dijk*. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, Vol. 19, Nomor 2, 164—172.
- Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana Kritis: Teori, Metode, dan Penerapannya Pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chaer, Abdul. 2015. *Morfologi Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2013. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Eriyanto. 2012. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks*. Yogyakarta: LKIS Group.
- Estherina, Ilona. 2015. *Analisis Wacana pada Editorial Majalah Lentera Edisi Salatiga Kota Merah*. (online) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rc=1&url=https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/download/19972/19580&ved=2ahUKEwi14vvuqZH4AhW-S2wGHsd_CqQOFnoECAoQAO&usq=AOvVaw2K_P81mCjYLi4K80mJ_IOE9 diakses pada 8 Desember 2021.
- Jawa Pos. 24 November 2021. Menagih Janji Mendikbud Mengangkat 1 Juta Guru, hal. 4.
- Kemendikbudristek. 2021. *PPPK Guru: Rekrutmen Guru PPPK*. (online) <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/> diakses pada 12 Januari 2022.
- Kristina, Diah. 2020. *Analisis Wacana dan Pengajarannya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kritina, Diah. 2020. *Analisis Wacana Kritis: Pengantar Praktis*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Depok: Rajawali Press.
- Salim, Satriwan. 2009. *Satriwan Blog's: Profil Saya*. (online) <https://satriwan.wordpress.com/profil-saya/> diakses pada 30 November 2021.).